

APAKAH MASYARAKAT DI PROPINSI JAWA BARAT MENIKMATI HASIL PERTUMBUHAN EKONOMI DI MASA PEMERINTAHAN JOKOWI PERIODE 1?

Lumadya Adi

Universitas Dr. Soetomo Surabaya
adiosulin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah pertama, untuk mencari sektor basis dan unbasis; kedua, untuk mengetahui apakah terjadi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita; ketiga, menjawab pertanyaan pertumbuhan ekonomi telah dinikmati mayoritas masyarakat di propinsi Jawa Barat. Alat analisis ada beberapa yaitu SLQ dan DLQ, tabel kuadran, indeks Eksploitasi. Hasil penelitian adalah pertama, tidak ada perubahan sektor basis pada tahun 2014 ke tahun 2018; kedua, ada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB perkapita namun ketimpangannya juga semakin lebar, ketiga, pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati mayoritas masyarakat di propinsi Jawa Barat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 1.

Keyword : eksploitasi ekonomi, indeks eksploitasi , pertumbuhan ekonomi, SLQ dan DLQ

ABSTRACT

The purpose of this paper are: first, to find basic and unbasis sectors; second, to find out whether there is economic growth and an increase in per capita income; third, to answer the question that economic growth has been enjoyed by the majority of people in West Java province. There are several analysis tools, namely SLQ and DLQ, quadrant tables, Exploitation index. The results of the study are first, there is no change in the sector basis from 2014 to 2018; second, there is an increase in economic growth and an increase in GDP per capita but the inequality is also widening, thirdly, economic growth can be enjoyed by the majority of people in West Java province during the era of President Joko Widodo administration period 1.

Keywords : economic exploitation, exploitation index, economic growth, SLQ and DLQ

I. PENDAHULUAN

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 1 pada tahun 2014-2018 mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen pertahun: tahun 2014 tumbuh 5,01persen; tahun 2015 pertumbuhan turun menjadi 4,87 persen; tahun 2016 tumbuh 5,03 persen; tahun 2017 tumbuh 5,07 persen; dan tahun 2018 pertumbuhan naik sedikit menjadi 5,17 persen. Pada masa tersebut presiden menghendaki negara kita untuk melakukan banyak investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing dengan harapan mampu untuk meningkatkan banyak lapangan kerja baru. Dengan semboyannya “KERJA, KERJA, KERJA maka investasi tersebut bak

“gayung bersambut” dimana kita memiliki faktor produksi tenaga kerja yang berlimpah dan teknologi maka modal akan bisa dikombinasikan dengan dua faktor produksi tersebut sehingga produksi nasional (*output*) akan meningkat dari waktu ke waktu sehingga terciptalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pulau Jawa merupakan kawasan yang menarik bagi investor dalam negeri dan asing untuk menanamkan modalnya salah satunya karena sarana dan prasarananya yang lebih memadai bila dibandingkan kawasan lainnya di negara kita, di luar sektor tambang. Untuk melihat perkembangan investasi dalam negeri dan asing di pulau Jawa berdasarkan propinsi, bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Realisasi Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri
pada propinsi di pulau Jawa Tahun 2014-2018 (Milyar Rupiah)

NO	PROPINSI	2014	2015	2016	2017	2018
1	DKI Jakarta	17.811,5	15.512,7	12.216,9	47.262,3	49.097,4
2	Jawa Barat	18.726,9	26.272,9	30.360,2	38.390,6	42.278,2
3	Jawa Tengah	13.601,6	15.410,7	24.070,4	9.866,0	27.474,9
4	D.I. Jogjakarta	703,9	362,4	948,6	294,6	6.131,7
5	Jawa Timur	38.132,0	35.489,8	46.331,6	45.044,5	33.333,1
6	Banten	8.081,3	10.709,9	12.426,3	15.141,9	18.637,6
	Jumlah	97.057,2	103.758,4	126.354,0	155.999,9	176.952,9

Sumber: BPS, diolah

Dari Tabel 1 tersebut kita lihat propinsi Jawa Timur merupakan tempat bagi investasi yang paling besar disusul propinsi Jawa Barat. Keuntungan dari investasi dalam negeri akan kembali dinikmati oleh masyarakat dalam negeri dan tidak ada yang mengalir ke luar negeri sehingga secara umum hasil pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati oleh mayoritas masyarakat dalam negeri. Memahami yang demikian maka investasi diutamakan kepada para investor dalam negeri.

Tabel 2
Realisasi Perkembangan Penanaman Modal Asing
pada propinsi di pulau Jawa Tahun 2014-2018 (Juta USD)

NO	PROPINSI	2014	2015	2016	2017	2018
1	DKI Jakarta	4.509,4	3.619,4	3.398,3	4.595,0	4.857,7
2	Jawa Barat	6.562,0	5.738,7	5.470,9	5.142,9	5.573,5
3	Jawa Tengah	463,4	850,4	1.030,8	2.372,5	2.372,7
4	D.I. Jogjakarta	64,9	89,1	19,6	36,5	81,3
5	Jawa Timur	1.802,5	2.593,4	1.941,0	1.566,7	1.333,4
6	Banten	2.034,6	2.542,0	2.912,1	3.047,5	2.827,3
	Jumlah	15.436,8	15.433,0	14.772,7	16.761,1	17.045,9

Sumber: BPS, diolah

Dari Tabel 2 tersebut kita lihat propinsi Jawa Barat merupakan tempat bagi investasi asing yang paling besar disusul propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kerugian dari investasi asing salah satunya adalah sebagian hasil (*return*) kembali ke negara investor sehingga kemakmuran masyarakat akan berkurang. Timbul sebuah pertanyaan apakah di propinsi Jawa Barat terjadi *Growth without Development* mengingat penanaman modal asing cukup besar? Hal inilah yang mendasari peneliti untuk mengambil lokasi penelitian di Jawa Barat.

Produk Domestik Regional Bruto meningkat mulai dari 2014 sd 2018 salah satunya pendorong karena masuknya investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Lebih jelasnya perkembangan PDRB propinsi Jawa Barat bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat Berdasarkan Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Milyar Rupiah)

SEKTOR	2014	2015	2016	2017	2018
1.	92.654	92.803	98.097	99.669	101.777
2.	27.291	27.404	27.139	26.590	25.496
3.	502.434	524.467	549.471	578.703	616.442
4.	6.373	5.940	6.140	5.438	5.439
5.	896	949	1.009	1.081	1.135
6.	92.603	98.555	103.507	111.001	119.305
7.	183.635	190.440	198.865	207.863	216.614
8.	51.580	56.320	61.297	64.259	67.702
9.	27.545	29.777	32.559	35.285	38.160
10.	36.005	41.879	47.857	53.527	58.421
11.	27.497	29.522	33.031	34.180	35.727
12.	13.121	13.838	14.738	16.110	17.663
13.	4.561	4.933	5.335	5.784	6.284
14.	23.677	24.987	25.739	26.933	27.361
15.	29.425	32.419	34.886	37.910	40.075
16.	7.781	8.881	9.723	10.538	11.370
17.	22.138	24.121	26.227	28.791	30.718
PDRB	1.149.216	1.207.235	1.275.620	1.343.662	1.419.689

Sumber: BPS, diolah

Keterangan: 1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2.Pertambangan dan Penggalian; 3.Industri Pengolahan; 4.Pengadaan Listrik dan Gas; 5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6.Konstruksi; 7.Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8.Transportasi dan Pergudangan; 9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10.Informasi dan Komunikasi; 11.Jasa

Keuangan dan Asuransi; 12.Real Estat; 13.Jasa Perusahaan; 14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; 15.Jasa Pendidikan; 16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17.Jasa Lainnya

Dari Tabel 3 tersebut kita lihat ada tiga sektor utama yang menyumbang PDRB yaitu sektor 3. Industri Pengolahan; sektor 6. Konstruksi; dan sektor 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Diharapkan tiga sektor ini menjadi sector basis (*base sector*) dalam rangka mendorong peningkatan produk domestik regional bruto. Untuk mengetahui hal ini, data akan dianalisis model *Location Quotient (LQ)* baik dengan *Static Location Quotient (SLQ)* maupun *Dynamic Location Quotient (DLQ)*. (Meningat keterbatasan halaman maka Produk Domestik Bruto harga konstan 2010 dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto harga konstan 2010 tidak peneliti cantumkan di sini).

Perkembangan sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 mulai tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Persen)

SEKTOR	2014	2015	2016	2017	2018
1.	0,50	0,12	4,74	2,56	8,97
2.	1,57	0,54	- 1,65	2,61	8,93
3.	5,11	4,42	2,23	1,92	2,84
4.	4,79	- 8,14	0,83	2,81	0,62
5.	5,95	5,88	8,87	10,37	7,39
6.	5,45	5,98	1,41	2,59	4,42
7.	3,31	3,66	3,05	3,51	3,81
8.	7,78	9,58	3,66	4,09	2,37
9.	6,00	8,10	3,25	3,82	4,40
10.	17,47	16,31	0,18	1,96	- 0,56
11.	4,36	7,36	3,50	5,07	4,42
12.	4,46	5,46	1,34	1,53	1,46
13.	6,92	8,15	1,11	1,86	4,06
14.	0,46	5,38	3,65	5,70	5,63
15.	14,43	10,19	2,35	5,86	9,58
16.	15,78	14,14	3,81	3,04	2,37
17.	8,80	8,96	4,75	4,13	4,10
PDRB	5,09	5,03	2,60	2,68	3,86

Sumber: BPS, diolah

Keterangan: 1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2.Pertambangan dan Penggalian; 3.Industri Pengolahan; 4.Pengadaan Listrik dan Gas; 5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6.Konstruksi; 7.Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8.Transportasi dan Pergudangan; 9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10.Informasi dan Komunikasi; 11.Jasa Keuangan dan Asuransi; 12.Real Estat; 13.Jasa Perusahaan; 14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; 15.Jasa Pendidikan; 16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17.Jasa Lainnya

Dari Tabel 4 tersebut kita lihat ada beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan minus yaitu 4. Pengadaan Listrik dan Gas (tahun 2015); 2. Pertambangan dan Penggalian (tahun 2016); dan 10. Informasi dan Komunikasi (tahun 2018), sedangkan sektor-sektor lain mengalami pertumbuhan positif bahkan ada yang tumbuh 17,47 persen yaitu sektor 10. Informasi dan Komunikasi (tahun 2014, di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo) dan 9,58 persen yaitu sektor 15. Jasa Pendidikan (tahun 2018, di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo). Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah apakah pertumbuhan-pertumbuhan tersebut bisa dinikmati oleh mayoritas masyarakat Jawa Barat? Apakah telah terjadi *Growth without Development*?

II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dipakai adalah statistik deskriptif. Analisis yang dipakai adalah *Static Location Quotient (LQ)* dan *Dynamic Location Quotient (LQ)*. *Static Location Quotient (LQ)* dipakai untuk melihat daya saing sektor-sektor pada masa awal (tahun 2014) dan akhir (2018) pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 1.

Rumus dari *Static Location Quotient (SLQ)* sebagai berikut (Kuncoro dan Idris, 2010: 177):

$$SLQ_{iK} = \frac{X_{iK} / \sum X_{iK}}{X_{iU} / \sum X_{iU}} \quad (1)$$

Rumus *Dynamic Location Quotient (DLQ)* sebagai berikut (Kuncoro dan Idris, 2010: 177):

$$DLQ_{iK} = \left[\frac{(1+g_{iK}) / (1+g_K)}{(1+G_{iU}) / (1+G_I)} \right] = \frac{IPPS_{iK}}{IPPS_{iU}} \quad (2)$$

Pada penelitian ini, untuk mencari SLQ perlu data PDRB propinsi Jawa Barat dan PDB Indonesia berdasarkan harga konstan 2010. Nilai SLQ > 1 artinya sektor

tersebut merupakan sektor basis (*base sector*) atau sektor yang memiliki daya saing kuat, sedangkan $SLQ < 1$, artinya sektor yang bukan basis (*unbases*).

Pada penelitian ini, untuk mencari DLQ perlu data pertumbuhan PDRB propinsi Jawa Barat dan pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan harga konstan 2010.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis sektor basis tahun 2014 dan 2018 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Analisis SLQ Tahun 2014 dan SLQ Tahun 2015

Sektor	SLQ-2014	SLQ-2018
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,6	0,55
2. Pertambangan dan Penggalian	0,25	0,23
3. Industri Pengolahan	1,97	1,98
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,49	0,36
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,95	0,95
6. Konstruksi	0,81	0,80
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,13	1,11
8. Transportasi dan Pergudangan	1,15	1,10
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,85
10. Informasi dan Komunikasi	0,68	0,76
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,62	0,61
12. Real Estat	0,37	0,42
13. Jasa Perusahaan	0,24	0,24
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,58	0,55
15. Jasa Pendidikan	0,81	0,88
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,68
17. Jasa Lainnya	1,20	1,17

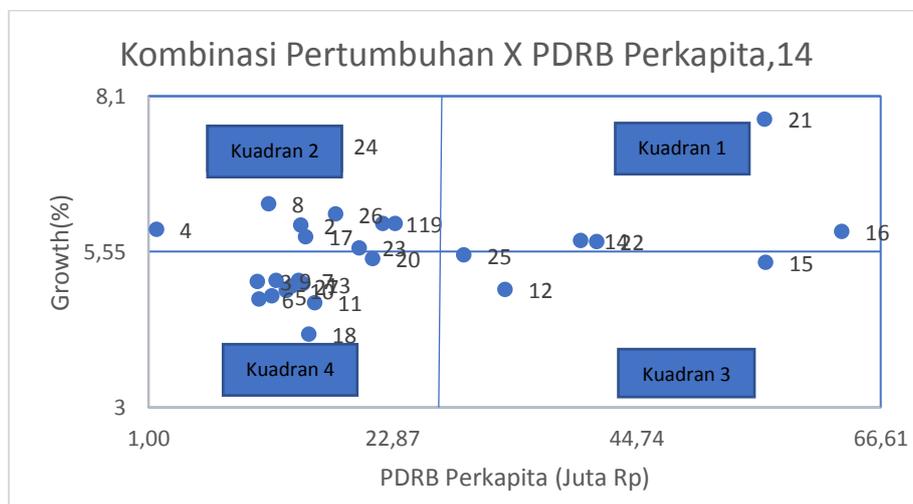
Sumber: BPS, diolah

Dari Tabel 5 kita ketahui belum ada perubahan sektor yang basis dengan sektor yang unbasis pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 1. Sektor-sektor basis meliputi sektor 3. Industri Pengolahan; 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan dan 17. Jasa Lainnya.

Propinsi Jawa Barat terdiri dari 18 Kabupaten dan 8 Kota sehingga total ada 27 daerah tingkat II. Tipologi kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat dibuat berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita (Hill, 1989; Kuncoro, 1996 dalam Kuncoro dan Idris, 2010: 174). Klasifikasi dibuat menjadi empat kuadran, dimana kuadran 1. daerah cepat maju dan cepat tumbuh; kuadran 2. Daerah maju tapi

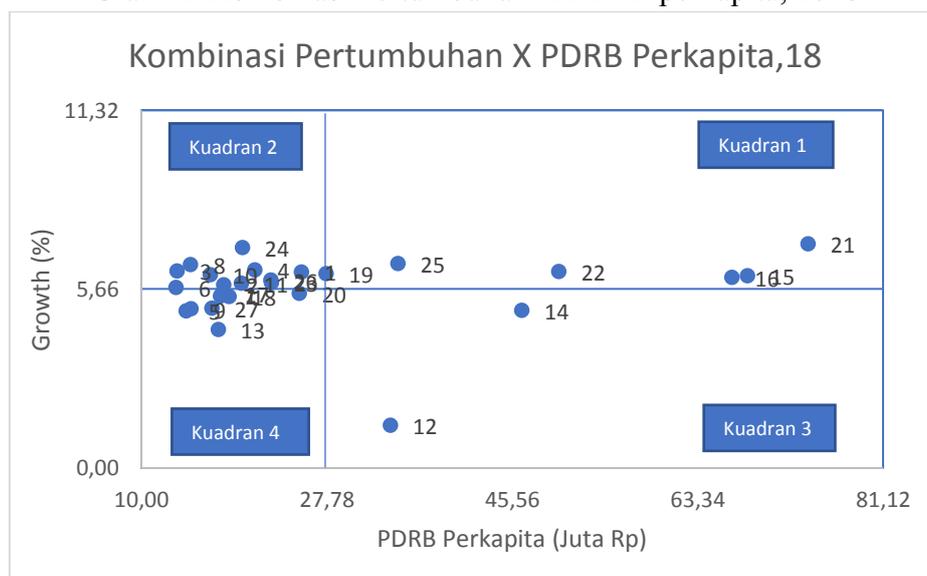
tertekan; kuadran 3. Daerah berkembang cepat; dan kuadran 4. Daerah relative tertinggal. Masing-masing kabupaten/kota akan diklasifikasikan ke kuadran tertentu berdasarkan pertumbuhan ekonominya dan PDRB perkapita tahun 2014 serta pertumbuhan ekonominya dan PDRB perkapita tahun 2018. Pembagian ke dalam dua grafik (tahun 2014 dan 2018) bertujuan untuk melihat perkembangan masing-masing daerah: jika grafik tahun 2018 semakin banyak kabupaten/kota yang menempati kuadran 1 berarti semakin bagus artinya semakin banyak kabupaten yang mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan PDRB perkapita tinggi. Sebaliknya, jika semakin banyak kabupaten/kota yang menempati kuadran 4 berarti semakin mengalami kemunduran karena semakin banyak kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya rendah serta PDRB perkapitanya rendah. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1 Kombinasi Pertumbuhan X PDRB perkapita, 2014



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2 Kombinasi Pertumbuhan X PDRB perkapita, 2018



Sumber: BPS, diolah

1.Bogor; 2.Sukabumi; 3.Cianjur; 4.Bandung; 5.Garut; 6.Tasikmalaya; 7.Ciamis; 8.Kuningan; 9.Cirebon; 10.Majalengka; 11.Sumedan; 12.ndramayu; 13.Subang; 14.Purwakarta; 15.Karawang; 16.Bekasi; 17.Bandung Barat; 18.Pangandaran; 19.Kota Bogor; 20.Kota Sukabumi; 21.Kota Bandung; 22.Kota Cirebon; 23.Kota Bekasi; 24.Kota Depok; 25.Kota Cimahi; 26.Kota Tasikmalaya; 27.Kota Banjar

Dari Grafik 1 kita ketahui rata-rata pertumbuhan 5,5% dan PDRB perkapita 22,87 juta Rupiah untuk tahun 2014. Banyak kabupaten/kota yang pertumbuhan tinggi di atas rata-rata dan PDRB perkapita tinggi namun perbedaan dengan lainnya tidak terlalu jauh. Dari Grafik 2 kita ketahui rata-rata pertumbuhan 5,66% dan PDRB perkapita 27,78 juta Rupiah untuk tahun 2018 berarti pendapatannya telah mengalami kenaikan. Dari grafik 2 kita ketahui bahwa sedikit kabupaten/kota mengalami kenaikan PDRB perkapita yang sangat ekstrim sementara yang lebih banyak berada pada posisi di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan kabupaten/kota yang semakin besar. Jika dibiarkan hal ini berbahaya karena bisa menciptakan golongan sangat miskin dan golongan sangat kaya.

Nilai SLQ dan DLQ untuk 17 sektor bisa diketahui pada tabel berikut:

Tabel 6

Nilai *Static Location Quotient (SLQ)* dan *Dynamic Location Quotient (DLQ)*
Masing-masing Sektor PDRB Jawa Barat terhadap PDB Indonesia

SEKTOR	SLQ	KETERANGAN	DLQ	KETERANGAN
1	0,57	UNBASIS	2,82	PROSPEKTIF
2	0,24	UNBASIS	265,66	PROSPEKTIF
3	1,96	BASIS	0,59	TIDAK PROSPEKTIF
4	0,42	UNBASIS	0,00	TIDAK PROSPEKTIF
5	0,95	UNBASIS	9,81	PROSPEKTIF
6	0,80	UNBASIS	0,37	TIDAK PROSPEKTIF
7	1,13	BASIS	1,38	PROSPEKTIF
8	1,14	BASIS	0,51	TIDAK PROSPEKTIF
9	0,82	UNBASIS	1,77	PROSPEKTIF
10	0,73	UNBASIS	0,20	TIDAK PROSPEKTIF
11	0,61	UNBASIS	0,78	TIDAK PROSPEKTIF
12	0,39	UNBASIS	0,48	TIDAK PROSPEKTIF

13	0,24	UNBASIS	0,17	TIDAK PROSPEKTIF
14	0,57	UNBASIS	3,88	PROSPEKTIF
15	0,85	UNBASIS	6,35	PROSPEKTIF
16	0,66	UNBASIS	1,48	PROSPEKTIF
17	1,19	BASIS	0,47	TIDAK PROSPEKTIF

Sumber: BPS, diolah

Keterangan: 1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2.Pertambangan dan Penggalian; 3.Industri Pengolahan; 4.Pengadaan Listrik dan Gas; 5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6.Konstruksi; 7.Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8.Transportasi dan Pergudangan; 9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10.Informasi dan Komunikasi; 11.Jasa Keuangan dan Asuransi; 12.Real Estat; 13.Jasa Perusahaan; 14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; 15.Jasa Pendidikan; 16. Jasa Pendidikan 17.Jasa Lainnya

Dari Tabel 6 tersebut berdasarkan nilai SLQ diketahui sektor-sektor yang menjadi sektor basis (*base sector*) dimana $SLQ > 1$ adalah 3. Industri Pengolahan; 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan; dan 17. Jasa Lainnya, sementara itu sektor-sektor lainnya bukanlah sektor basis, sedangkan berdasarkan nilai DLQ dapat diketahui sektor-sektor yang prospektif ($DLQ > 1$) maupun sektor-sektor yang tidak prospektif ($DLQ < 1$). Sektor yang prospektif adalah 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 2. Pertambangan dan Penggalian 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sedangkan sektor -sektor lainnya adalah sektor bukan basis.

Nilai-nilai SLQ dan DLQ pada Tabel 6 akan diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu unggulan ($SLQ > 1$ dan $DLQ > 1$), andalan ($SLQ < 1$ dan $DLQ > 1$), prospektif ($SLQ > 1$ dan $DLQ < 1$), dan tertinggal ($SLQ < 1$ dan $DLQ < 1$) seperti pada Tabel 7 seperti di bawah ini:

Tabel 7

Klasifikasi Sektor Berdasarkan Gabungan Nilai SLQ dan DLQ

Kriteria	SLQ < 1	SLQ > 1
DLQ > 1	andalan	unggulan
DLQ < 1	tertinggal	prospektif

Sumber: KUncoro, *et al* (2009) dalam Kuncoro, 2010: 178

Didasarkan pada Tabel 6 dan Tabel 7 dapatlah dibuat Tabel 8 yang berisi sektor-sektor yang telah diklasifikasikan. Sektor-sektor yang Unggulan ada 1 yaitu sektor 7; andalan terdiri dari tujuh sektor yaitu sektor 1. ; 2.; 5.; 9. ; 14.; 15. ; 16. dan prospektif terdiri dari tiga sektor yaitu sektor 3. 8. 17. dan tertinggal terdiri dari enam sektor yaitu 4.; 6.; 10.; 11.; 12.; 13.

Tabel 8
Klasifikasi Sektor Berdasarkan Gabungan Nilai SLQ dan DLQ

Kriteria	SLQ < 1	SLQ > 1
DLQ > 1	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.Pertambangan dan Penggalian 5.Pengadaan Listrik dan Gas 9. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
DLQ < 1	4.Pengadaan Listrik dan Gas 6.Konstruksi 10.Transportasi dan Pergudangan 11.Jasa Keuangan dan Asuransi 12.Real Estat 13.Jasa Perusahaan	3.Industri Pengolahan 8.Transportasi dan Pergudangan 17.Jasa Lainnya

Sumber: BPS, diolah

Untuk menjawab pertanyaan tentang apakah pertumbuhan-pertumbuhan tersebut bisa dinikmati oleh mayoritas masyarakat Jawa Barat? Apakah telah terjadi *Growth without Development?*, dapat dianalisis data dari PDRB perkapita, Konsumsi perkapita, dan Tingkat Eksploitasi Ekonomi propinsi Jawa Barat. Rumus Indeks Eksploitasi sebagai berikut (Kuncoro, 2019: 82):

$$\text{Indeks Eksploitasi} = 1 - \frac{\text{Konsumsi Perkapita}}{\text{PDRB perkapita}}$$

Hasil analisis data dengan indeks eksploitasi bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9
Indeks Eksploitasi Ekonomi
Propinsi-propinsi di pulau Jawa, 2014-2018

Nomor	Propinsi	2014	2015	2016	2017	2018
1	DKI Jakarta	0,4118	0,4151	0,4169	0,4197	0,4205
2	Banten	0,4226	0,4227	0,4221	0,4258	0,4288
3	Jawa Barat	0,3709	0,3707	0,3728	0,3771	0,3809
4	Jawa Tengah	0,3918	0,3977	0,4016	0,4052	0,4087
5	Jawa Timur	0,3814	0,3926	0,3982	0,4036	0,4073
6	D.I. Jogjakarta	0,3975	0,3987	0,3999	0,4002	0,4129

Sumber: BPS, diolah

Dari Tabel 9 kita ketahui Bersama bahwa Indeks Eksploitasi Ekonomi terus meningkat, semula 0,3709 (tahun 2014) menjadi 0,3809 (tahun 2018) dapat diartikan hasil pembangunan yang dinikmati mayoritas penduduk semakin meningkat meskipun adanya investasi asing. Angka indeks sebesar 0,3709 dimaknai jika ada kenaikan PDRB 100%, maka proporsi yang dinikmati mayoritas penduduk propinsi Jawa Barat sebesar 37,09%.

Hasil analisis ini menjawab pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi mampu dinikmati mayoritas masyarakat propinsi Jawa Barat? Apakah terjadi *Growth without Development*? Sebuah fakta bahwa Pertumbuhan ekonomi yang tercapai bisa dinikmati mayoritas penduduk propinsi Jawa Barat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 1 dan tidak terjadi *Growth without Development*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan:

1. Sektor basis tidak ada perubahan dari tahun 2014 ke 2018. Sektor basis adalah sektor yang memiliki daya saing tinggi sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
2. Berdasarkan grafik kombinasi pertumbuhan ekonomi dengan PDRB perkapita telah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB perkapita yang sangat tinggi hanya beberapa kabupaten/kota saja sementara itu mayoritas mengalami peningkatan yang kecil. Hal ini bisa dimaknai terjadi ketimpangan yang semakin lebar.
3. Pertumbuhan ekonomi yang tercapai selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dinikmati mayoritas penduduk propinsi Jawa Barat.

Saran-saran:

1. Perlu investasi ditingkatkan untuk sektor basis.
2. Pemerintah Propinsi Jawa Barat perlu untuk memperkecil ketimpangan PDRB perkapita antar kabupaten/kota dengan cara menciptakan *growth pole* yang baru di setiap regional agar tenaga kerja bisa terserap ikut bekerja dan mendapatkan *reward* yang layak.
3. Pertumbuhan ekonomi perlu mengikutsertakan orang miskin agar tingkat kemiskinan semakin menurun sehingga semakin banyak yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Mudrajad Kuncoro, 2019, *Ekonomika Regional Teori dan Praktek, Buku*.

Mudrajad Kuncoro dan Ahmad Nafis Idris, 2010, Mengapa terjadi Growth Without Development di provinsi Kalimantan Timur? *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 11*, Nomor 2, Desember 2010, halaman 172-190.

Pressman, S. 2002. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, (terjemahan), Murai Kencana, Cetakan Kedua, Pebruari, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

BPS, Statistik Indonesia, pelbagai edisi.

BPS, Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka , pelbagai edisi.

BPS, Provinsi Banten Dalam Angka, pelbagai edisi.

BPS, Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, pelbagai edisi.

BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, pelbagai edisi.

BPS, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, pelbagai edisi.

BPS, Provinsi D.I. Jogjakarta Dalam Angka, pelbagai edisi.